

Dampak Aksi Publik Terhadap Kebijakan Parlemen: Studi Pada Kasus Kenaikan Anggaran dan Tunjangan DPR

Palma Juanta 1, Cellyn Chen 2, Gladys Huang 3, Jordy Septian Wijaya 4

^{1,2,3,4}*Universitas Prima Indonesia, Indonesia*

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 21-01-2025

Disetujui 25-02-2026

Diterbitkan 26-02-2026

Penulis Korespondensi*:

Gladys Huang

Universitas Prima Indonesia,
Indonesia

gladyshuang207@gmail.com



©2025 Penulis. Diterbitkan oleh PT. Good Novelty Group. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

ABSTRAK

Aksi publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam merespons kebijakan parlemen, termasuk kebijakan terkait kenaikan anggaran dan tunjangan DPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh aksi publik terhadap kebijakan parlemen pada kasus kenaikan anggaran dan tunjangan DPR. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dengan pengumpulan data melalui kuesioner skala Likert yang disebarakan kepada 59 responden menggunakan Google Form. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi Spearman sebagai uji utama, serta uji regresi linier sederhana sebagai analisis tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aksi publik dan kebijakan parlemen dengan nilai signifikansi 0,649 ($>0,05$). Hasil uji regresi linier sederhana juga menunjukkan bahwa aksi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan parlemen. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa aksi publik belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan parlemen dalam kasus kenaikan anggaran dan tunjangan DPR.

KATA KUNCI

Aksi Publik, Kebijakan Parlemen, Demonstrasi 2025, Tunjangan DPR, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Parlemen sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, khususnya dalam perumusan kebijakan publik, pengawasan pemerintahan, serta pengelolaan anggaran negara. Dalam praktiknya, kebijakan parlemen sering kali menimbulkan respons publik, terutama ketika kebijakan tersebut dipersepsikan tidak sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Respons tersebut mencerminkan bentuk partisipasi politik warga negara yang bertujuan menyuarakan aspirasi serta menuntut akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat. Dalam kajian politik kontemporer, aksi publik dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi politik yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan. Aksi demonstrasi, mobilisasi massa, serta kampanye opini melalui media sosial merupakan sarana masyarakat untuk memengaruhi agenda kebijakan dan meningkatkan responsivitas institusi politik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik dapat mendorong perubahan kebijakan apabila berlangsung secara konsisten, memperoleh legitimasi sosial, serta didukung oleh pemberitaan media yang luas. Namun demikian, berbagai studi juga menemukan bahwa pengaruh aksi publik tidak selalu signifikan, terutama pada kebijakan strategis yang dipengaruhi oleh kepentingan elite politik dan dinamika internal lembaga legislatif.

Proses pengambilan kebijakan di parlemen pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, tetapi juga oleh faktor internal seperti negosiasi antar-fraksi, kepentingan partai politik, serta pertimbangan kelembagaan. Dalam konteks kebijakan anggaran dan tunjangan anggota parlemen, keputusan sering kali mencerminkan kompromi politik internal yang relatif tertutup dari pengawasan publik langsung. Kondisi ini menunjukkan potensi adanya kesenjangan

antara partisipasi publik dan respons kebijakan parlemen.

Fenomena tersebut tercermin dalam munculnya gelombang aksi publik yang menolak kebijakan kenaikan anggaran dan tunjangan DPR di Indonesia. Aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil berlangsung di berbagai wilayah dan memperoleh perhatian luas dari media. Meskipun tekanan publik tersebut cukup masif dan disertai kritik yang intens di ruang digital, kebijakan parlemen tetap berjalan tanpa perubahan signifikan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas aksi publik dalam memengaruhi keputusan legislatif. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran aksi publik dalam membentuk opini publik, stabilitas politik, dan dinamika gerakan sosial. Namun, penelitian yang secara empiris menguji hubungan langsung antara aksi publik dan kebijakan parlemen, khususnya dalam konteks kebijakan anggaran dan tunjangan legislatif, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara kuantitatif hubungan serta kecenderungan pengaruh aksi publik terhadap kebijakan parlemen pada kasus kenaikan anggaran dan tunjangan DPR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh aksi publik terhadap kebijakan parlemen, sekaligus memberikan pemahaman mengenai efektivitas partisipasi masyarakat dalam mendorong perubahan kebijakan di tingkat legislatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis hubungan dan kecenderungan pengaruh aksi publik terhadap kebijakan parlemen dalam konteks kenaikan anggaran dan tunjangan DPR. Penelitian dilaksanakan pada November 2025 dengan responden berusia 18-30 tahun yang memiliki keterpaparan terhadap isu aksi publik dan kebijakan parlemen.

Populasi penelitian adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan dan ketertarikan terhadap isu sosial politik, khususnya aksi publik dan kebijakan parlemen. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden pernah mengikuti atau menyuarakan opini terkait aksi publik, baik secara langsung maupun melalui media daring. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 59 orang.

Instrumen penelitian berupa kuesioner daring berbasis Google Form dengan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 ("Sangat Tidak Setuju") hingga skor 5 ("Sangat Setuju"). Variabel aksi publik sebagai variabel independen (X) dan kebijakan parlemen sebagai variabel dependen (Y) masing-masing diukur menggunakan lima indikator. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson antara skor item dan skor total, sedangkan uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan kriteria nilai $\alpha > 0,70$.

Analisis data meliputi analisis deskriptif, uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, uji korelasi Spearman sebagai uji utama untuk mengukur hubungan antarvariabel, serta uji regresi linier sederhana sebagai analisis tambahan untuk melihat kecenderungan pengaruh aksi publik terhadap kebijakan parlemen. Seluruh analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

A. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi jumlah responden, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari aksi publik (X) dan kebijakan parlemen (Y).

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviaton
Aksi Publik (Total_X)	59	6	24	17,22	3,394
Kebijakan Parlemen (Total_Y)	59	5	20	13,56	3,323

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 59 responden, diperoleh bahwa variabel aksi publik (Total_X) memiliki nilai maksimum sebesar 6 dan maksimum 24, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 17,22 serta standar deviasi 3,394. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan persepsi responden terhadap aksi publik berada pada kategori cukup tinggi. Selanjutnya, variabel kebijakan parlemen (Total_Y) memiliki nilai maksimum sebesar 5 dan maksimum 20, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 13,56 dan standar deviasi 3,323. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kebijakan parlemen berada pada kategori sedang. Nilai standar deviasi yang relatif kecil pada kedua variabel menunjukkan bahwa data responden cukup homogen.

B. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson antara skor setiap item pernyataan dengan skor total variabel. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan

Item	r_{hitung}	Sig.	r_{tabel}	Keterangan
X₁	0,624	0,000	0,361	Valid
X₂	0,703	0,000	0,361	Valid
X₃	0,758	0,000	0,361	Valid
X₄	0,753	0,000	0,361	Valid
X₅	0,699	0,000	0,361	Valid
Y₁	0,785	0,000	0,361	Valid
Y₂	0,724	0,000	0,361	Valid
Y₃	0,588	0,000	0,361	Valid
Y₄	0,539	0,000	0,361	Valid
Y₅	0,485	0,000	0,361	Valid

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pernyataan pada variabel Aksi Publik (X) dan Kebijakan Parlemen (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel (0,361) serta nilai signifikan kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

C. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1.	Aksi Publik (X)	0,752	Reliabel
2.	Kebijakan Parlemen (Y)	0,605	Cukup Reliabel

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2025)

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Aksi Publik (X) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,752 yang berarti instrumen penelitian bersifat reliabel karena nilai alpha lebih besar dari 0,70. Sementara itu, variabel Kebijakan Parlemen (Y) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,605, sehingga termasuk dalam kategori cukup reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian layak digunakan untuk analisis data selanjutnya.

D. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk, karena jumlah responden kurang dari 100, yaitu sebanyak 59 responden.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (Shapiro-Wilk)

Variabel	Statistik Shapiro-Wilk	Sig.	Keterangan
Aksi Publik (Total_X)	0,971	0,175	Normal
Kebijakan Parlemen (Total_Y)	0,956	0,034	Tidak Normal

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel Uji Normalitas Shapiro-Wilk, diketahui bahwa nilai signifikan (Sig.) untuk variabel Total_X sebesar 0,175, yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data variabel Total_X berdistribusi normal. Sementara itu, nilai signifikan (Sig.) untuk variabel Total_Y sebesar 0,034, yang menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, data variabel Total_Y tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh data penelitian berdistribusi normal, sehingga analisis lanjutan dalam penelitian ini menggunakan metode statistik non-parametrik.

E. Uji Korelasi Spearman

Uji Korelasi Spearman Rank digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel aksi publik (Total_X) dan kebijakan parlemen (Total_Y). Uji ini dipilih karena berdasarkan hasil uji normalitas, data tidak berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Spearman

Variabel X	Variabel Y	Koefisien Korelasi (ρ)	Sig. (p-value)	N	Keterangan
Aksi Publik (Total_X)	Kebijakan Parlemen (Total_Y)	-0,061	0,649	59	Tidak Signifikan

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,061 dengan nilai signifikansi 0,649. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara aksi publik dan kebijakan parlemen. Nilai koefisien korelasi yang mendekati nol menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel sangat lemah dan bersifat negatif.

F. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk melihat kecenderungan pengaruh variabel aksi publik (X) terhadap variabel kebijakan parlemen (Y), serta untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh yang mungkin ditimbulkan meskipun hubungan antarvariabel tidak signifikan secara statistik.

- Uji t (Pengaruh Parsial)

Tabel 6. Uji t

Variabel Independen	Koefisien (B)	t hitung	Sig.
Aksi Publik (Total_X)	-0,036	-0,280	0,780

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 4.1.4, hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,780, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel aksi publik (Total_X) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan parlemen (Total_Y).

- Uji F (Kelayakan Model Regresi)

Tabel 7. Uji F

Model	F hitung	Sig.
Regresi	0,079	0,780

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.1.4, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,780, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier sederhana dalam penelitian ini tidak signifikan atau tidak layak digunakan untuk memprediksi kebijakan parlemen berdasarkan aksi publik.

- Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Uji R^2

R	R Square	Adjusted R Square
0,037	0,001	-0,016

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS (2025)

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,001 menunjukkan bahwa variabel aksi publik hanya mampu menjelaskan 0,1% variasi pada variabel kebijakan parlemen, sedangkan 99,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

G. Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa aksi publik tidak memiliki hubungan maupun pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan parlemen, khususnya dalam konteks kenaikan anggaran dan tunjangan DPR. Hasil uji korelasi spearman menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,649 ($>0,05$) dengan koefisien korelasi -0,061, yang mengindikasikan bahwa hubungan antara aksi publik dan kebijakan parlemen bersifat sangat lemah dan tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa intensitas dan persepsi responden terhadap aksi publik belum mampu membentuk hubungan yang nyata dengan perubahan atau respon kebijakan parlemen. Selanjutnya, hasil uji regresi linier sederhana juga memperkuat temuan tersebut. Nilai signifikansi uji t dan uji F sebesar 0,780 ($>0,05$) menunjukkan bahwa aksi publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan parlemen. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,001 menunjukkan bahwa aksi publik hanya mampu menjelaskan 0,1% variasi kebijakan parlemen, sedangkan 99,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kepentingan politik, struktur kelembagaan, dinamika internal parlemen, serta tekanan elite dan partai politik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun aksi publik sering kali muncul sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat, dampaknya terhadap kebijakan parlemen tidak selalu bersifat langsung dan signifikan. Dalam konteks kenaikan anggaran dan tunjangan DPR, kebijakan parlemen cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan internal lembaga legislatif dan mekanisme politik formal, sehingga suara publik belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksi publik belum menjadi faktor dominan dalam memengaruhi kebijakan parlemen, khususnya terkait kebijakan anggaran dan tunjangan DPR. Temuan ini sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara partisipasi publik dan respons kebijakan parlemen, yang menjadi catatan penting dalam upaya memperkuat demokrasi dan akuntabilitas lembaga legislatif.

2. Pembahasan

A. Makna Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi publik tidak memiliki hubungan maupun pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan parlemen dalam konteks kenaikan anggaran dan tunjangan DPR. Nilai koefisien korelasi yang sangat lemah serta tidak signifikan mengindikasikan bahwa intensitas dan persepsi responden terhadap aksi publik tidak berkorelasi secara langsung

dengan perubahan atau respons kebijakan parlemen. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan demonstrasi dan tekanan opini publik tidak serta-merta mampu mengubah keputusan legislatif.

Secara substantif, hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait anggaran dan tunjangan DPR lebih dipengaruhi oleh faktor internal kelembagaan dibandingkan tekanan eksternal dari masyarakat. Proses pengambilan keputusan di parlemen cenderung berlangsung dalam kerangka formal yang melibatkan negosiasi antar-fraksi, kepentingan partai politik, serta pertimbangan strategis institusional. Dengan demikian, meskipun aksi publik dapat meningkatkan perhatian media dan membangun opini publik, dampaknya terhadap keputusan kebijakan belum tentu bersifat langsung. Temuan ini juga memperlihatkan adanya jarak antara partisipasi politik masyarakat dan efektivitasnya dalam memengaruhi kebijakan publik. Aksi publik dalam bentuk demonstrasi atau kampanye daring mungkin berfungsi sebagai simbol ekspresi ketidakpuasan, namun belum cukup kuat untuk mengintervensi proses politik formal di parlemen.

B. Kesesuaian dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Secara teoretis, partisipasi politik merupakan elemen penting dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, teori responsivitas politik menyatakan bahwa institusi politik akan merespons tuntutan publik apabila tekanan tersebut berdampak pada legitimasi kekuasaan, stabilitas politik, atau elektabilitas aktor politik. Dalam kasus kenaikan anggaran dan tunjangan DPR, tekanan publik yang muncul tampaknya belum mencapai tingkat yang mampu memengaruhi struktur pengambilan keputusan di parlemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan parlemen sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elite dan dinamika internal lembaga legislatif. Model politik dalam pengambilan kebijakan menjelaskan bahwa keputusan publik merupakan hasil kompromi antar-aktor politik yang memiliki kepentingan strategis. Oleh karena itu, kebijakan anggaran dan tunjangan DPR lebih mungkin ditentukan oleh solidaritas kelembagaan dan kepentingan partai dibandingkan tekanan massa.

Namun demikian, hasil ini juga dapat berbeda dengan studi-studi yang menunjukkan bahwa aksi publik mampu memengaruhi kebijakan dalam isu tertentu, terutama ketika gerakan sosial berlangsung secara berkelanjutan dan memperoleh dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas aksi publik sangat kontekstual dan bergantung pada jenis kebijakan, struktur kekuasaan, serta tingkat konsolidasi gerakan sosial.

C. Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi penguatan demokrasi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Tidak signifikannya pengaruh aksi publik terhadap kebijakan parlemen menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan formal. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan saluran partisipasi yang lebih sistematis, seperti advokasi kebijakan berbasis data, dialog publik yang terstruktur, serta peningkatan transparansi dalam proses legislasi. Selain itu, hasil ini memberikan gambaran bahwa gerakan sosial perlu dikombinasikan dengan strategi politik yang lebih terorganisasi agar memiliki daya pengaruh yang lebih kuat. Aksi publik yang bersifat sporadis dan temporer cenderung memiliki dampak terbatas terhadap kebijakan strategis yang melibatkan kepentingan institusional.

D. Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah responden yang relatif terbatas, yaitu 59 orang, dapat memengaruhi tingkat generalisasi hasil penelitian. Kedua, karakteristik responden yang didominasi oleh kelompok usia 18–30 tahun membatasi representasi persepsi kelompok usia lainnya. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus kebijakan, yaitu kenaikan anggaran dan tunjangan DPR, sehingga hasilnya tidak dapat secara langsung digeneralisasi pada seluruh kebijakan parlemen. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan lebih beragam secara demografis. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk menggali secara lebih mendalam dinamika hubungan antara aksi publik dan kebijakan parlemen, termasuk faktor-faktor politik internal yang tidak dapat diukur melalui survei kuantitatif semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai dampak aksi publik terhadap kebijakan parlemen pada kasus kenaikan anggaran dan tunjangan DPR, dapat disimpulkan bahwa aksi publik tidak memiliki hubungan maupun pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan parlemen. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa hubungan antara aksi publik dan kebijakan parlemen bersifat sangat lemah dan tidak signifikan. Temuan ini diperkuat oleh hasil uji regresi linier sederhana, baik melalui uji t maupun uji F, yang menunjukkan bahwa aksi publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan parlemen. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang sangat kecil juga mengindikasikan bahwa kontribusi aksi publik dalam menjelaskan perubahan kebijakan parlemen sangat terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kenaikan anggaran dan tunjangan DPR, kebijakan parlemen lebih dipengaruhi oleh faktor internal lembaga legislatif dan dinamika politik, dibandingkan oleh tekanan atau partisipasi publik. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi publik dan respons kebijakan parlemen, yang menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih partisipatif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. (2025). Gelombang protes terhadap kebijakan tunjangan DPR di masa krisis ekonomi. Jakarta: Harapan Press.
- Lestari, M. (2024). Dinamika sosial politik dan kritik masyarakat terhadap parlemen. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahendra, L. (2025). Kekerasan aparat dan hak asasi manusia dalam penanganan aksi demonstrasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Demokrasi Nusantara.
- Nugroho, B. (2023). Analisis kebijakan keuangan negara terhadap tunjangan pejabat legislatif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, R. (2024). Reaksi publik terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR di Indonesia. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Pratama, R. (2025). Dinamika media sosial dan reaksi publik terhadap elite politik Indonesia. Jakarta: Citra Wacana Nusantara.
- Rahardjo, F. (2025). Dinamika sosial politik dan kekerasan dalam aksi massa di Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, D. (2023). Peran dan fungsi parlemen dalam sistem politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Ramadhani, F. (2025). Kontroversi pernyataan politik dan dampaknya terhadap citra parlemen Indonesia. Jakarta: Pustaka Reformasi.
- Santoso, A. (2024). Kontroversi kebijakan tunjangan anggota DPR: Analisis kebijakan publik dan respons masyarakat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiawan, D. (2025). Bentrok demonstrasi penolakan tunjangan DPR dan respons aparat keamanan. Jakarta: Citra Persada Media.
- Siregar, T. (2024). Transparansi anggaran dan kesejahteraan pejabat publik di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A. (2021). Partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 123–134.
- Yusuf, R. (2025). Media, opini publik, dan viralitas peristiwa sosial politik di era digital. Yogyakarta: Deepublish.